



RENSTRA

TAHUN 2021 - 2026

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Sulawesi Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
9. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinir oleh instansi Pemerintah.

11. Rencana . . .

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi dan prioritas pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
12. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/ Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Sulawesi Tengah untuk Periode 20 (dua puluh) tahun, memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
17. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

19. Bersifat . . .

19. Bersifat indikatif adalah data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
20. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

BAB II KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
 - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
 - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN
 - h. BAB VIII : PENUTUP
- (2) Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV . . .

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 17 JANUARI 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,





KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta dijadikan rujukan dalam menyusun Rencana Strategis Anggaran tahun 2021-2026

Tujuan penyusunan Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 adalah; menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah; memuat program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Renstra dan RKPD; serta sebagai masukan dan evaluasi dalam mengendalikan dan memutuskan kebijaksanaan pembangunan pada masa-masa yang akan datang.

Kiranya laporan ini dapat menjadi acuan manajemen kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran pegawai BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, Januari 2022
Plt.KEPALA BAPPEDA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr.Ir.CHIRSTINA SHANDRA TOBONDO, MT
Pembina Utama Madya
Nip. 19670526 199203 2 006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I	
DAFTAR ISI	II	
DAFTAR TABEL	III	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	Gambaran Pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah	7
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah	7
	2.2 Sumber Daya Bappeda Provinsi Sulawesi	14
	2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah	22
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda	29
BAB III	Permasalahan dan Isu-isu Strategis Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah	30
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda	30
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	32
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	33
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	37
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	38
BAB IV	Tujuan dan Sasaran	40
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	40
BAB V	Strategi dan Arah Kebijakan	45
BAB VI	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	47
BAB VII	Kinerja Pelayanan Bidang urusan	64
BAB VIII	Penutup	66



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Klasifikasi Pegawai Sesuai Eselon	15
Tabel 2.2	Klasifikasi Personel Bappeda Prov. Sulteng Menurut Golongan	15
Tabel 2.3	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan	15
Tabel 2.4	Klasifikasi Pegawai menurut Pendidikan pada Bappeda Prov. Sulteng	16
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Keadaan Tahun 2019-2020	17
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	23
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	25
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah	31
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah	44
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2026	46
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2022-2026	48
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD	64
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama Bappeda	65



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-undang tersebut, bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada publik. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu Perangkat Daerah sesuai dengan tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Adapun Rencana strategis yang disusun oleh Bappeda merupakan komitmen yang digunakan sebagai tolak ukur bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah "Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju". Bappeda diharapkan dapat mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.



Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW, Renstra Kementerian PPN/Bappenas, dan sejumlah dokumen Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 PrpTahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah



- Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Renstra-BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 adalah:

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kinerja (Renja) Tahunan;
2. Menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan BAPPEDA secara konsekwen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi;
3. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh BAPPEDA dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;



4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan tahun 2021-2026;

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra adalah untuk:

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
- c. Memberikan pedoman bagi seluruh unit kerja Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra-BAPPEDA Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah



- 2.2 Sumber Daya Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Badan Daerah tipe A, dan Peraturan Gubernur nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Tugas, fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan Bidang Perencanaan Ekonomi, Perencanaan Sosial Budaya, Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Perencanaan Pembangunan Makro dan Pengendalian Monitoring dan Evaluasi;
2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perencanaan Ekonomi, Perencanaan Sosial Budaya, Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Perencanaan Pembangunan Makro dan Pengendalian Monitoring dan Evaluasi;
3. Pelaksanaan Administrasi Badan Perencanaan dan Pembangunan;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur;
5. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perencanaan Ekonomi, Perencanaan Sosial Budaya, Perencanaan Infrastruktur dan



Pengembangan Wilayah dan Perencanaan Pembangunan Makro dan Pengendalian Monitoring dan Evaluasi;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah dibantu oleh Sekretaris dan 4 (empat) bidang sebagai berikut:

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan perencanaan program, pengelolaan keuangan dan aset, serta pengelolaan kepegawaian dan umum di lingkungan Badan.

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, Sekertaris mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan dan aset, dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan umum;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, dan pengelolaan kepegawaian dan umum;
- c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan dan aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan dan aset, rumah tangga dan umum;
- e. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Sekretaris membawahi tiga Sub Bagian yaitu ;

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan



- c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

2. Bidang Perencanaan Ekonomi

Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas persiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang Perencanaan Ekonomi I, Perencanaan Ekonomi II, dan Perencanaan Ekonomi III.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan pengelolaan bidang administrasi di Bidang Perencanaan Ekonomi I, Perencanaan Ekonomi II, dan Perencanaan Ekonomi III;
- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di Bidang Perencanaan Ekonomi I, Perencanaan Ekonomi II, dan Perencanaan Ekonomi III;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan di Bidang Perencanaan Ekonomi I, Perencanaan Ekonomi II, dan Perencanaan Ekonomi III;
- d. Penyiapan bahan pengkoordinasian di bidang Bidang Perencanaan Ekonomi I, Perencanaan Ekonomi II, dan Perencanaan Ekonomi III dan pihak unit terkait;
- e. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta perencanaan di bidang Bidang Perencanaan Ekonomi I, Perencanaan Ekonomi II, dan Perencanaan Ekonomi III;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis di bidang Bidang Perencanaan Ekonomi I, Perencanaan Ekonomi II, dan Perencanaan Ekonomi III;
- g. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang Bidang Perencanaan Ekonomi I, Perencanaan Ekonomi II, dan Perencanaan Ekonomi III;



- h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- i. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang Bidang Perencanaan Ekonomi I, Perencanaan Ekonomi II, dan Perencanaan Ekonomi III.

Bidang Perekonomian dan Pengembangan Wilayah membawahi tiga Sub Bidang yaitu :

- a. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi I;
- b. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi II; dan
- c. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi III.

3. Bidang Perencanaan Sosial Budaya

Bidang Perencanaan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di Bidang Perencanaan Sosial Budaya

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Perencanaan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan pengelolaan bidang administrasi di Bidang Perencanaan Sosbud I, Perencanaan Sosbud II, dan Perencanaan Sosbud III;
- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di Bidang Perencanaan Sosbud I, Perencanaan Sosbud II, dan Perencanaan Sosbud III;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan di Bidang Perencanaan Sosbud I, Perencanaan Sosbud II, dan Perencanaan Sosbud III;



- d. Penyiapan bahan pengkoordinasian di bidang Bidang Perencanaan Sosbud I, Perencanaan Sosbud II, dan Perencanaan Sosbud III dan pihak unit terkait;
- e. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis serta perencanaan di bidang Bidang Perencanaan Sosbud I, Perencanaan Sosbud II, dan Perencanaan Sosbud III;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas teknis di bidang Bidang Perencanaan Sosbud I, Perencanaan Sosbud II, dan Perencanaan Sosbud III;
- g. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang Bidang Perencanaan Sosbud I, Perencanaan Sosbud II, dan Perencanaan Sosbud III

Bidang Sosial budaya membawahi tiga Sub Bidang yaitu :

- a. Sub Bidang Perencanaan Sosbud I;
- b. Sub Bidang Perencanaan Sosbud II; dan
- c. Sub Bidang Perencanaan Sosbud III.

4. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I, Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II, dan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I, Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II, dan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III;



- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I, Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II, dan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, bimbingan teknis di Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I, Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II, dan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III;
- d. Penyiapan bahan penyelenggaraan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I, Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II, dan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III;
- e. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I, Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II, dan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III;
- f. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- g. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I, Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II, dan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III.

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi dua Sub Bidang yaitu:

- a. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I;
- b. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II; dan



c. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
III.

5. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi perencanaan makro, penyiapan data, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Dalam penyelenggaraan tugas, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

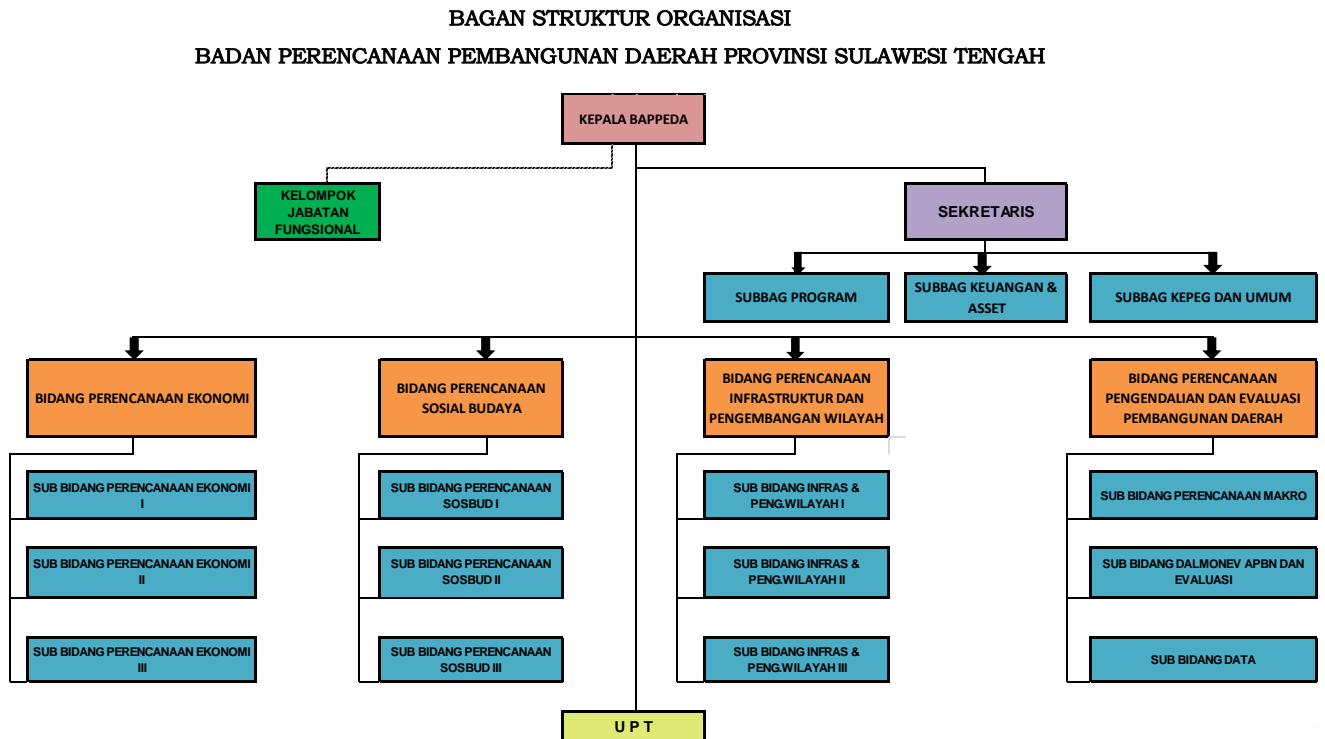
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan makro, penyiapan data, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, bimbingan teknis di bidang perencanaan makro, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. Penyiapan bahan penyelenggaraan perencanaan makro, penyiapan data serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- d. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perencanaan makro, penyiapan data serta pengendalian evaluasi pembangunan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi 3 (tiga) Sub bidang yaitu :

1. Sub Bidang Perencanaan Makro;
2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
3. Sub Bidang Data.



Adapun Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 yang kemudian dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi sebagai berikut :



Sumber : Pergub Sulteng Nomor 41 Tahun 2020.

2.2. Sumber Daya BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah

2.2.1. Sumber Daya Manusia BAPPEDA

Sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah mencakup sumber daya manusia, asset/modal. Sumber daya manusia yang tersedia di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah sejumlah 179 orang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Tidak Tetap dengan perjanjian kontra berjumlah 62 orang



Kondisi kepegawaian di BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah per 1 Januari 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.1: Klasifikasi Pegawai sesuai Eselon

Pegawai	Jumlah
Eselon II	1 Orang
Eselon III	5 Orang
Eselon IV	15 Orang
Staf	154 Orang
PHL	62 Orang
Jumlah	237 Orang

Tabel 2.2 : Klasifikasi Personil BAPPEDA Prov. Sulteng menurut Golongan :

Pegawai	Jumlah
Golongan I	2 Orang
Golongan II	51 Orang
Golongan III	115 Orang
Golongan IV	7 Orang
Jumlah	175 orang

Tabel 2.3 : Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah
Kepala	1 Orang
Sekretaris	1 Orang
Kepala Bidang	4 Orang
Kepala Sub Bagian	3 Orang
Kepala Sub Bidang	12 Orang
Jumlah	21 Orang



Tabel 2.4 : Klasifikasi pegawai menurut Pendidikan pada BAPPEDA Prov.
Sulteng

S3	S2	S1	SARJANA MUDA	SLTA	SLTP	SD
3	32	87	6	44	3	0

2.2.2. Sumber daya Aset Sarana dan Prasarana Bappeda

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selain sumberdaya manusia, sarana dan prasarana penunjang mutlak diperlukan oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengembang tugas dan fungsinya agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efesien. Adapun daftar inventaris sarana dan prasarana Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :



Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
Keadaan Tahun 2019-2020

No Urut	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah	Unit	Ket
TAHUN 2019									
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	TOYOTA / INNOVA Venturer 2.4 A/T	Besi	Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
2	Scooter	Yamaha / Freego VIN 2019		Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
3	Scooter	Yamaha / Freego VIN 2019		Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
4	Scooter	Yamaha / Freego Vin 2019		Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
5	Scooter	Yamaha / Freego Vin 2019		Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
6	Scooter	Yamaha / Freego Vin 2019		Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
7	Scooter	Yamaha / N-MAX 155 NON ABS VIN 219	Metal	Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
8	Scooter	Yamaha / N-MAX 155 NON ABS VIN 219	Metal	Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
9	Scooter	Yamaha / N-MAX 155 NON ABS VIN 219	Metal	Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
10	Scooter	Yamaha / N-MAX 155 NON ABS VIN 219	Metal	Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
11	Scooter	Yamaha / N-MAX 155 NON ABS VIN 219	Metal	Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
12	Mesin Ketik Listrik Portable	Brother / GX 8250		Pembelian	2019	Baik	5	Unit	
13	Brand Kas	Galileo	Besi	Pembelian	2019	Baik	2	Unit	
14	Kursi Kerja	Ichiko / IC 110	Oscar/ Fabric	Pembelian	2019	Baik	60	Unit	
15	Gordyn	Gordyn Pimpinan / Gorden Vertikal Blinds (SP 8805 Light Gree)	Kain	Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
16	Karpet	Zam-Zam / Karpet Sajada Hijau Bintik		Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
17	Karpet	Karpet Danube		Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
18	AC Split	Sharp Split / Room Air Conditioner (AH-A9UCY)		Pembelian	2019	Baik	5	Unit	
19	AC Split	Sharp Split / Room Air Conditioner (AH-A18UCY)		Pembelian	2019	Baik	5	Unit	
20	Dispenser	Modena / DD 75 L (Cold, Hot,& Normal)		Pembelian	2019	Baik	1	Unit	



21	Dispenser	Modena / DD 75 L (Cold, Hot,& Normal)		Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
22	Dispenser	Modena / DD 75 L (Cold, Hot,& Normal)		Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
23	Dispenser	Modena / DD 75 L (Cold, Hot,& Normal)		Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
24	Dispenser	Modena / DD 75 L (Cold, Hot,& Normal)		Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
25	Dispenser	Modena / DD 75 L (Cold, Hot,& Normal)		Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
26	Dispenser	Modena / DD 75 L (Cold, Hot,& Normal)		Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
27	Dispenser	Modena / DD 75 L (Cold, Hot,& Normal)		Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
28	Dispenser	Modena / DD 75 L (Cold, Hot,& Normal)		Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
29	Dispenser	Modena / DD 75 L (Cold, Hot,& Normal)		Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
30	Televisi	Samsung / Smart Tv UHD UA55U7100	Metal	Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
31	Televisi	Samsung / Smart Tv UHD UA55U7100	Metal	Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
32	Televisi	Samsung / Smart Tv UHD UA55U7100	Metal	Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
33	Televisi	Samsung / Smart Tv UHD UA55U7100	Metal	Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
34	Televisi	Samsung / Smart Tv UHD UA55U7100	Metal	Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
35	Televisi	Samsung / Smart Tv UHD UA55U7100	Metal	Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
36	Televisi	Samsung / Smart Tv UHD UA55U7100	Metal	Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
37	Televisi	Samsung / Smart Tv UHD UA55U7100	Metal	Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
38	Televisi	Samsung / Smart Tv UHD UA55U7100	Metal	Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
39	Televisi	Sharp / LC-60SA5500X	Metal	Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
40	Loudspeaker	Toa Speaker / ZS-645R (6W)		Pembelian	2019	Baik	1	Unit	



41	Loudspeaker	TOA / Wireless Toa		Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
42	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Atmosphere / Air Treatment (Pembersih Udara)		Pembelian	2019	Baik	6	Unit	
43	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Elephant Wall Braket LED / (Penyangga TV LED)	Metal	Pembelian	2019	Baik	9	Unit	
44	P.C Unit/ Komputer PC	HP / All In One 24 R 175D	Metal	Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
45	P.C Unit/ Komputer PC	HP / All In One 24 R 175D	Metal	Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
46	P.C Unit/ Komputer PC	HP / All In One 24 R 175D	Metal	Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
47	P.C Unit/ Komputer PC	HP / All In One 24 R 175D	Metal	Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
48	P.C Unit/ Komputer PC	HP / All In One 24 R 175D	Metal	Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
49	P.C Unit/ Komputer PC	HP / All In One 24 R 175D	Metal	Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
50	P.C Unit/ Komputer PC	HP / All In One 24 R 175D	Metal	Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
51	Lap Top	HP / Pav x360 Convert 14-dh0011TX	Fiber	Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
52	Lap Top	HP / Pav x360 Convert 14-dh0011TX	Fiber	Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
53	Lap Top	HP / Pav x360 Convert 14-dh0011TX	Fiber	Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
54	Lap Top	HP / Pav x360 Convert 14-dh0011TX	Fiber	Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
55	Lap Top	HP / Pav x360 Convert 14-dh0011TX	Fiber	Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
56	Lap Top	HP / Pav x360 Convert 14-dh0011TX	Fiber	Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
57	Lap Top	HP / Pav x360 Convert 14-dh0011TX	Fiber	Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
58	Printer	Epson / L5190		Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
59	Printer	Epson / L5190		Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
60	Printer	Epson / L5190		Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
61	Printer	Epson / L5190		Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
62	Printer	Epson / L5190		Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
63	Printer	Epson / LQ 2190		Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
64	Printer	Epson / LQ 2190		Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
65	Harddisk Eksternal	WD My Passport	Metal	Pembelian	2019	Baik	7	Unit	



Rencana Strategis Tahun 2021-2026
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

66	Meja Kerja Pejabat	2 Biro + Meja Samping	Kayu Kelas II	Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
67	Meja Kerja Pejabat	1 Biro + meja Samping	Kayu Kelas II	Pembelian	2019	Baik	8	Unit	
68	Meja Kerja	Ichiko / IC 902-A	Melamine, Beech/Che	Pembelian	2019	Baik	60	Unit	
69	Kursi Kerja Pejabat	Daxte I SHDT	Leather, Kaki Aluminium	Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
70	Kursi Kerja Pejabat	D-250 AL TC	Leather	Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
71	Kursi Kerja Pejabat	302 C HDT	Oskar, Kaki Chrome, HDT, PU	Pembelian	2019	Baik	8	Unit	
72	Lemari Arsip untuk	Lemari Arsip / 2 Pintu	Kayu Daerah	Pembelian	2019	Baik	10	Unit	
73	Lemari Arsip untuk	Lemari Arsip / 3 Pintu	Kayu Daerah	Pembelian	2019	Baik	10	Unit	
74	Lemari Arsip untuk	Lion (Lemari Arsip Besi) / L33A (2 Pintu	Besi	Pembelian	2019	Baik	10	Unit	
75	Proyektor +	Epson / EB-450 H843C		Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
76	Proyektor +	Epson / EB-450 H843C		Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
77	Proyektor +	Epson / EB-450 H843C		Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
78	Proyektor +	Epson / EB-450 H843C		Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
79	Proyektor +	Epson / EB-450 H843C		Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
80	Proyektor +	Epson / EB-450 H843C		Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
81	Proyektor +	Epson / EB-450 H843C		Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
82	Peralatan studio Visual Lain-lain	Led Videotron / P10 Full Color		Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
83	Peralatan studio Visual Lain-lain	Led Videotron / P4 Full Color		Pembelian	2019	Baik	1	Unit	
84	Peralatan studio Visual Lain-lain	Led Videotron / P4 Full Color		Pembelian	2019	Baik	2	Unit	
85	Mixer	Roland / V-4EX Mixer Video	Metal	Pembelian	2019	Baik	2	Unit	
86	Air Sumber Kapasitas Sedang	-	Instalasi Air	Pembelian	2019	Baik	1	Paket	
TAHUN 2020									
1	Electric Generating Set Lain-lain	Engine Alternator / 1106A-70TAG3, HTG 274G Silent Type	-	Pembelian	2020	Baik	1	Unit	
2	Kursi Lipat	Indachi / DCL 06 C	-	Pembelian	2020	Baik	20	Unit	
3	Sofa	Oscar/ Fabric / 3,2,1 Seater	-	Pembelian	2020	Baik	3	Unit	
4	Meja Partisi	Work Station/ Meja Partisi / 2 Orang Sejajar	-	Pembelian	2020	Baik	9	Unit	
5	Meja Partisi	Work Station/ Meja Partisi / 1 Orang	-	Pembelian	2020	Baik	1	Unit	



6	Meja Partisi	Work Station/ Meja Partisi / 2 Orang Seजार	-	Pembelian	2020	Baik	9	Unit	
7	Lemari Es	Sharp / SJ-326 GC- SR	-	Pembelian	2020	Baik	1	Unit	
8	Lemari Es	Sharp / SJ 236 MG GB	-	Pembelian	2020	Baik	4	Unit	
9	AC Unit	Sharp / AH-A 18 UCY	-	Pembelian	2020	Baik	2	Unit	
10	AC Unit	Sharp / AH-A 9 UCY	-	Pembelian	2020	Baik	2	Unit	
11	Televisi	Sharp / LED 4TC50 BK II LED UHD	-	Pembelian	2020	Baik	2	Unit	
12	P.C Unit/ Komputer PC	HP / PC All in One 22-DD0117D AIO Proc. Intel Core i3	-	Pembelian	2020	Baik	13	Unit	
13	P.C Unit/ Komputer PC	HP / Pc All In One 24-F0051D AIO Proc. Intel Core i5	-	Pembelian	2020	Baik	2	Unit	
14	Printer	Epson / L 850	-	Pembelian	2020	Baik	6	Unit	
15	Printer	Epson / WF 7711 A3	-	Pembelian	2020	Baik	7	Unit	
16	UPS	APC SMC 1000 / IC Smart Conection UPS Tower	-	Pembelian	2020	Baik	4	Unit	
17	Harddisk Eksternal	Seagate	-	Pembelian	2020	Baik	6	Unit	
18	Meja Kerja Pejabat	Ichiko / Davico I	-	Pembelian	2020	Baik	1	Unit	
19	Meja Rapat Pejabat	Meja Indachi Renard & Kursi Ichiko / IC 608 E PP Bahan Oskar/ Hitam Kayu Nylon	-	Pembelian	2020	Baik	1	Unit	
20	Kursi Kerja Pejabat	Ichiko / Nolito I Leather, Hydrolic, Tilting Control	-	Pembelian	2020	Baik	1	Unit	
21	Camera + Attachment	Canon / EOS 6D Mark II Body Only	-	Pembelian	2020	Baik	1	Unit	
22	Camera + Attachment	Canon / IXUS 285 HS Black	-	Pembelian	2020	Baik	1	Unit	
23	Peralatan studio Visual Lain-lain	Sony / ICD PX470	-	Pembelian	2020	Baik	2	Unit	
24	Tripod Camera	Jieyang / JY 0506 Monopod With Fluid Head	-	Pembelian	2020	Baik	1	Unit	
25	Lensa Kamera	Canon / EF	-	Pembelian	2020	Baik	1	Unit	



2.3. Kinerja Pelayanan BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah

Capaian kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Renstra periode Tahun 2016-2021, baik Pencapaian Kinerja serta Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah, adalah sebagaimana tabel 2.6 berikut.



Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD 2005-2025 (Perda No. 06 Tahun 2009) yang telah ditetapkan dengan PERDA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Tersedianya Dokumen Perencanaan ; RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA		2 Dokumen		1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-					
	Tersedianya Rencana Strategi (RENSTRA) BAPPEDA		2 Dokumen		1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-					
	Tersedianya Dokumen Perencanaan ; RKPD yang telah ditetapkan dengan PERGUB		5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					
	Tersedianya Dokumen Perencanaan ; Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah ditetapkan dengan PERGUB		12 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-					
	Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi		10 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan					
	Buku Strategi Daerah (STRADA) Pengentasan kemiskinan		1 Buku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PK)		1 Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Rencana Aksi Daerah Millenium Development Goals (RAD-MDGs)		1 Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (RAD-SDGs)		1 Dokumen		-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-					
	Rencana Aks Daerah pemberantasan Korupsi (RAD-PK)		1 Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Dokumen Masterplan Pendidikan		1 Dokumen		1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-					
	Dokumen Masterplan Kesehatan		1 Dokumen		1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-					
	Dokumen RAD Percepatan Pencapaian Target Justice For All		1 Dokumen		1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-					
	Dokumen Renstra AMPL		1 Dokumen		1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-					
	Jaringan Data Spasial Daerah		6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					
	Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		6 Buku		1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku					
	Profil Daerah Provinsi Sulawesi Tengah		6 Buku		1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku					
	Data Audio Visual Sulteng		6 Data Interaktif		1 Data Interaktif	1 Data Interaktif	1 Data Interaktif	1 Data Interaktif	1 Data Interaktif	1 Data Interaktif	1 Data Interaktif	1 Data Interaktif	1 Data Interaktif	1 Data Interaktif					
	Evaluasi APBN dan DAK		6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					
	Evaluasi APBD		6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					
	Evaluasi RKPD		6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					
	Evaluasi Mid Term RPJMD		1 Buku		-	-	1 Buku	-	-	-	-	1 Buku	-	-					
	Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan		1 Dokumen		1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-					
	Laporan Pelaksanaan APBN dan APBD		12 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-					
	Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi		493 Kali		75 Kali	80 Kali	85 Kali	90 Kali	95 Kali	75 Kali	80 Kali	85 Kali	90 Kali	95 Kali					

* Berdasarkan Perubahan Renstra 2016



Tabel di atas menjabarkan tentang pencapaian Kinerja Bappeda pada periode Renstra Tahun 2016-2021. Pada Tahun 2017, sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021, maka Bappeda menetapkan Perubahan Rencana Strategis yang berimplikasi pada perubahan kinerja pelayanan Bappeda.

Adapun alokasi anggaran dan realisasi serapan anggaran pada periode tersebut disertai rasio dan rata-rata pertumbuhan alokasi anggaran dapat diuraikan dalam tabel 2.7. berikut ini :



Rencana Strategis Tahun 2021-2026
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 - 2020

Uraian *** (1)	Anggaran pada Tahun Ke-					Capaian	Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
	2016	2017	2018	2019	2020		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Program Perencanaan Pembangunan	0.558	2,724,669,658	2,810,799,000	2,400,484,625	2,019,887,450	1,097,900,472	0.558	2,702,833,040	2,779,934,970	2,298,932,275	1,971,778,020	1,018,699,270					2,210,748,241.00	2,154,435,515.00	
1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi		575,929,000	513,444,000	484,656,050	391,766,050	221,183,800		571,354,550	498,647,120	455,880,500	390,870,425	162,564,070	0.99	0.97	0.94	1.00	0.73	437,395,780.00	415,863,333.00
2 Koordinasi Perencanaan Bidang Pariwisata dan Pendapatan Daerah		-	399,065,000	336,027,600	282,997,600	149,904,334		-	398,695,000	333,428,800	281,107,906	136,608,900	-	1.00	0.99	0.99	0.91	233,598,906.80	229,968,121.20
3 Koordinasi Perencanaan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan		-	482,750,000	382,163,000	424,188,000	278,964,400		-	482,722,300	353,923,600	405,536,030	277,168,450	-	1.00	0.93	0.96	0.99	313,613,080.00	303,870,076.00
4 Koordinasi Perencanaan Bidang Perikanan dan Kelautan		472,237,898	509,000,000	400,913,800	351,695,800	168,604,338		470,393,100	496,464,150	386,969,800	328,792,959	163,379,850	1.00	0.98	0.97	0.93	0.97	380,490,367.20	369,199,971.80
5 Koordinasi Perencanaan Bidang Perindustrian dan Perdagangan		-	576,235,000	500,932,700	284,610,000	139,070,200		-	573,439,300	481,900,800	284,480,900	139,070,200	-	1.00	0.96	1.00	1.00	300,169,580.00	295,778,240.00
6 Koordinasi Perencanaan Bidang Koperasi, UMKM dan Penanaman Modal		-	330,305,000	295,791,475	284,630,000	140,173,400		-	329,967,100	286,828,775	280,989,800	139,907,800	-	1.00	0.97	0.99	1.00	210,179,975.00	207,538,695.00
7 Koordinasi Perencanaan Program Pertanian, Perkebunan dan Peternakan		529,677,800	-	-	-	-		520,479,300	-	-	-	-	0.98	-	-	-	-	105,935,560.00	104,095,860.00
8 Koordinasi Perencanaan Program Perdagangan, Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Penanaman Modal		551,016,000	-	-	-	-		550,625,940	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	110,203,200.00	110,125,188.00
9 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Lintas Sektor		595,808,960	-	-	-	-		589,980,150	-	-	-	-	0.99	-	-	-	-	119,161,792.00	117,996,030.00
Program Perencanaan Pembangunan	0.7143	2,571,699,814	2,416,200,000	2,776,177,300	1,741,186,705	1,071,864,880	0.714	2,530,092,051	2,379,201,729	2,636,912,410	1,683,238,145	1,042,167,700					2,115,425,739.80	2,054,322,407.00	
1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pembinaan Program Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		-	529,695,000	456,322,200	333,442,857	403,670,200		-	528,534,400	455,929,110	328,868,645	383,307,600	-	1.00	1.00	0.99	0.95	344,626,051.40	339,327,951.00
2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya		191,760,000	-	-	-	-		186,244,465	-	-	-	-	0.97	-	-	-	-	38,352,000.00	37,248,893.00
3 Koordinasi Perencanaan dan Pembinaan Program Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		360,132,000	-	-	-	-		358,834,200	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	72,026,400.00	71,766,840.00
4 Koordinasi Perencanaan Pembinaan Kepegawaian serta Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Aparatur		-	266,305,000	254,144,700	180,139,794	92,908,600		-	263,605,900	253,714,600	179,593,200	92,069,800	-	0.99	1.00	1.00	0.99	158,699,618.80	157,796,700.00
5 Koordinasi Perencanaan dan Pembinaan Program Kesehatan		244,500,000	644,700,000	1,035,010,400	543,450,454	216,388,827		243,035,000	644,565,500	987,841,000	525,722,000	213,268,800	0.99	1.00	0.95	0.97	0.99	536,809,936.20	522,886,460.00
6 Koordinasi Perencanaan dan Pembinaan Program Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		-	316,700,000	316,400,000	219,035,600	129,242,453		-	315,949,879	310,498,000	215,984,900	126,972,400	-	1.00	0.98	0.99	0.98	196,275,610.60	193,881,035.80
7 Koordinasi Perencanaan dan Pembinaan Program Pembangunan Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan		-	482,500,000	538,000,000	357,556,300	138,489,000		-	452,182,250	468,420,800	339,622,700	135,583,300	-	0.94	0.87	0.95	0.98	303,309,060.00	279,161,810.00
8 Koordinasi Perencanaan dan Pembinaan Program Bidang Hukum dan HAM serta Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pemberantasan Korupsi serta Ketenteraman dan Ketertiban Hukum, Perlindungan Masyarakat		251,700,000	176,300,000	176,300,000	107,561,700	91,165,800		239,314,006	174,363,800	160,508,900	93,446,700	90,965,800	0.95	0.99	0.91	0.87	1.00	160,605,500.00	151,719,841.20
9 Koordinasi Perencanaan dan Pembinaan Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung		366,790,200	-	-	-	-		363,583,860	-	-	-	-	0.99	-	-	-	-	73,358,040.00	72,716,772.00
10 Koordinasi Perencanaan dan Pembinaan Program Bidang Pemberdayaan Perempuan dan KB		240,000,000	-	-	-	-		232,949,900	-	-	-	-	0.97	-	-	-	-	48,000,000.00	46,589,980.00



Rencana Strategis Tahun 2021-2026
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

11	Koordinasi Perencanaan dan Pembinaan Program Agama, Pemerintahan dan Umum	176,255,000	-	-	-	-	173,811,900	-	-	-	-	0.99	-	-	-	-	35,251,000.00	34,762,380.00
12	Koordinasi Perencanaan dan Pembinaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat	211,595,786	-	-	-	-	208,590,000	-	-	-	-	0.99	-	-	-	-	42,319,157.20	41,718,000.00
13	Koordinas Percepatan Pencapaian Target MDGs	212,221,828	-	-	-	-	208,845,520	-	-	-	-	0.98	-	-	-	-	42,444,365.60	41,769,104.00
14	Koordinasi Kebijakan dan Manajemen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Lintas SKPD dan Lintas Sektor	316,745,000	-	-	-	-	314,883,200	-	-	-	-	0.99	-	-	-	-	63,349,000.00	62,976,640.00
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam		0.7692	1,593,419,100	2,402,510,000	2,187,763,616	2,678,230,762	2,531,253,763	0.769	1,539,375,306	2,351,865,780	2,106,737,470	2,546,354,450	2,271,918,950				2,278,635,448.20	2,163,250,391.20
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Bina Marga, Tata Ruang dan Litbang	-	420,690,400	402,762,426	406,175,000	305,634,197	-	412,603,790	389,524,400	366,978,500	300,465,900	-	0.98	0.97	0.90	0.98	307,052,404.60	293,914,518.00
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perhubungan dan Kominfo	166,327,800	297,364,600	214,650,500	163,490,000	115,592,982	164,195,080	295,605,600	214,320,500	161,171,700	115,038,800	0.99	0.99	1.00	0.99	1.00	191,485,176.40	190,066,336.00
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Keciaptakarya dan Pengelolaan Sumberdaya Air, Pengendalian Penduduk dan KB, Dukcapil dan BPBD	-	365,622,600	347,868,033	289,493,033	221,597,753	-	358,614,060	342,975,670	288,130,900	218,296,800	-	0.98	0.99	1.00	0.99	244,916,283.80	241,603,486.00
4	Koordinasi Pembinaan Program Irigasi Partisipatif (WISMP-2) dan (IPDMIP)	200,000,000	561,022,400	639,857,000	1,211,076,000	1,451,419,443	181,643,850	545,559,430	581,559,700	1,149,285,850	1,221,460,450	0.91	0.97	0.91	0.95	0.84	812,674,968.60	735,901,856.00
5	Koordinasi Perencanaan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Penguatan Kelembagaan BKPRD	138,381,000	410,224,800	295,190,979	328,774,729	236,706,400	135,144,100	397,063,400	294,044,700	312,794,000	228,424,700	0.98	0.97	1.00	0.95	0.97	281,855,581.60	273,494,180.00
6	Koordinasi Perencanaan Bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan ESDM	-	347,585,200	287,434,678	279,222,000	200,302,988	-	342,419,500	284,312,500	267,993,500	188,232,300	-	0.99	0.99	0.96	0.94	222,908,973.20	216,591,560.00
7	Pembinaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	159,776,800	-	-	-	-	156,386,000	-	-	-	-	0.98	-	-	-	-	31,955,360.00	31,277,200.00
8	Koordinasi Penyusunan Perencanaan Program Prasarana Jalan dan Jembatan	141,661,600	-	-	-	-	137,812,350	-	-	-	-	0.97	-	-	-	-	28,332,320.00	27,562,470.00
9	Koordinasi Pelaksanaan RAD Gas Rumah Kaca	243,527,600	-	-	-	-	241,234,377	-	-	-	-	0.99	-	-	-	-	48,705,520.00	48,246,875.40
10	Koordinasi Pembangunan Bidang Mitigasi Bencana	130,713,000	-	-	-	-	127,236,600	-	-	-	-	0.97	-	-	-	-	26,142,600.00	25,447,320.00
11	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Perumahan, Pemukiman, dan Keciaptakarya	135,908,800	-	-	-	-	128,865,839	-	-	-	-	0.95	-	-	-	-	27,181,760.00	25,773,167.80
12	Perencanaan dan Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Air	119,613,700	-	-	-	-	116,644,300	-	-	-	-	0.98	-	-	-	-	23,922,740.00	23,328,860.00
13	Koordinasi Perencanaan Program Energi dan Sumber Daya Mineral	157,508,800	-	-	-	-	150,212,810	-	-	-	-	0.95	-	-	-	-	31,501,760.00	30,042,562.00
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		1.000	522,000,000	-	-	-	1.000	517,654,800	-	-	-	-	-	-	-	-	104,400,000.00	103,530,960.00
1	Pengembangan Ekonomi Kawasan Strategis Cepat Tumbuh	522,000,000	-	-	-	-	517,654,800	-	-	-	-	0.99	-	-	-	-	104,400,000.00	103,530,960.00
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan		1.000	523,393,400	597,340,200	-	-	1.000	425,783,100	576,169,430	-	-	-	-	-	-	-	224,146,720.00	200,390,506.00
1	Peningkatan Kemampuan Tekhnis Aparat Perencanaan	523,393,400	597,340,200	-	-	-	425,783,100	576,169,430	-	-	-	0.81	0.96	-	-	-	224,146,720.00	200,390,506.00
Program Perencanaan Tata Ruang		1.000	443,200,000	-	-	-	1.000	424,434,800	-	-	-	-	-	-	-	-	88,640,000.00	84,886,960.00
1	Penguatan Lembaga Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah	443,200,000	-	-	-	-	424,434,800	-	-	-	-	0.96	-	-	-	-	88,640,000.00	84,886,960.00
Program Pelayanan Administrasi		0.500	1,902,191,800	2,270,000,000	1,866,528,924	2,223,354,747	1,789,803,024	0.500	1,799,039,323	1,921,736,602	1,657,443,390	2,069,856,949	1,547,406,833				2,010,375,699.00	1,799,096,619.40
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	1,902,191,800	2,270,000,000	1,866,528,924	2,223,354,747	1,789,803,024	1,799,039,323	1,705,659,452	1,657,443,390	2,069,856,949	1,547,406,833	0.95	0.83	0.89	0.93	0.86	1,966,375,699.00	1,755,881,189.40
2	Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	-	220,000,000	-	-	-	-	216,077,150	-	-	-	-	0.98	-	-	-	44,000,000.00	43,215,430.00



Rencana Strategis Tahun 2021-2026
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1.000	1,511,352,604	2,304,020,100	1,225,780,000	6,358,549,927	5,053,520,449	1.000	1,483,255,000	2,202,515,500	1,219,020,000	5,598,300,240	4,459,233,700							3,290,644,616.00	2,992,464,888.00
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur		1,511,352,604	2,304,020,100	1,225,780,000	6,358,549,927	5,053,520,449		1,483,255,000	2,202,515,500	1,219,020,000	5,598,300,240	4,459,233,700	0.98	0.96	0.99	0.88	0.88		3,290,644,616.00	2,992,464,888.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1.000	713,595,600	740,354,000	657,366,328	586,389,700	409,147,600	1.000	699,324,380	733,769,900	634,101,700	571,704,000	403,247,400							621,370,645.60	608,429,476.00
1	Penyusunan Pelaporan Asset Daerah		233,620,600	274,603,878	240,609,800	176,459,500	135,844,000		231,077,530	273,779,900	217,579,800	170,373,200	135,174,400	0.99	1.00	0.90	0.97	1.00		212,227,555.60	205,596,966.00
2	Peningkatan Kualitas Perencanaan Sistem Keuangan Internal		479,975,000	465,750,122	416,756,528	409,930,200	273,303,600		468,246,850	459,990,000	416,521,900	401,330,800	268,073,000	0.98	0.99	1.00	0.98	0.98		409,143,090.00	402,832,510.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		0.000	-	228,379,000	552,605,000	510,846,106	373,943,525	0.000	-	215,074,800	472,462,380	498,829,885	363,192,100							333,154,726.20	309,911,833.00
1	Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana Daerah		-	-	552,605,000	510,846,106	373,943,525		-	-	472,462,380	498,829,885	363,192,100	-	-	0.85	0.98	0.97		287,478,926.20	266,896,873.00
2	Pengembangan SDM		-	228,379,000	-	-	-		-	215,074,800	-	-	-	-	0.94	-	-	-		45,675,800.00	43,014,960.00
Program Perencanaan Pembangunan		0.7143	4,781,006,400	3,139,202,500	2,604,525,737	3,356,972,803	2,015,727,440	0.714	4,446,631,150	3,078,887,225	2,488,372,559	3,220,900,552	1,652,717,993							3,179,486,975.95	2,977,501,895.80
1	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANG)		1,266,191,800	839,558,300	795,503,241	778,059,603	274,156,300		1,244,346,750	838,608,300	795,353,241	772,293,900	274,151,350	0.98	1.00	1.00	0.99	1.00		790,693,848.80	784,950,708.20
2	Koordinasi Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Daerah		-	685,017,100	450,984,600	1,139,532,000	776,537,731		-	664,450,925	432,488,850	1,115,154,652	600,597,300	-	0.97	0.96	0.98	0.77		610,414,286.15	562,538,345.40
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		2,216,282,000	1,288,746,100	1,050,785,296	1,130,149,200	899,375,166		1,956,453,900	1,251,547,000	961,787,868	1,077,155,000	712,311,100	0.88	0.97	0.92	0.95	0.79		1,317,067,552.40	1,191,850,973.60
4	Sosialisasi Rencana dan Capaian Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah		-	325,881,000	307,252,600	309,232,000	65,658,243		-	324,281,000	298,742,600	256,297,000	65,658,243	-	1.00	0.97	0.83	1.00		201,604,768.60	188,995,768.60
5	Sosialisasi RPJMD 2011-2016 Tahun ke-4		499,365,600	-	-	-	-		479,597,600	-	-	-	-	0.96	-	-	-	-		99,873,120.00	95,919,520.00
6	Koordinasi, Konsisten Rencana Program dan Kegiatan Renstra SKPD		327,917,000	-	-	-	-		320,487,800	-	-	-	-	0.98	-	-	-	-		65,583,400.00	64,097,560.00
7	Penyusunan RKPD		471,250,000	-	-	-	-		445,745,100	-	-	-	-	0.95	-	-	-	-		94,250,000.00	89,149,020.00
Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi		0.8462	2,761,119,600	1,913,632,200	1,714,686,900	1,387,691,800	613,811,798	0.846	2,640,660,050	1,886,009,000	1,591,823,700	1,355,600,430	603,039,500							1,678,188,459.60	1,615,426,536.00
1	Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah		-	634,180,400	613,117,500	429,071,500	149,860,000		-	619,920,300	568,666,000	427,177,850	149,859,700	-	0.98	0.93	1.00	1.00		365,245,880.00	441,405,962.50
2	Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah		240,035,000	414,321,800	346,860,600	307,228,500	163,785,000		238,406,000	411,552,500	307,412,300	304,498,600	163,635,000	0.99	0.99	0.89	0.99	1.00		294,446,180.00	285,100,880.00
3	Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah		-	480,749,800	391,446,800	344,097,000	146,209,398		-	476,989,400	375,525,900	328,204,110	144,053,900	-	0.99	0.96	0.95	0.99		272,500,599.60	331,193,327.50
4	Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Dana Desa dan DAK Provinsi Sulawesi Tengah		177,020,800	384,380,200	363,262,000	307,294,800	153,957,400		170,940,850	377,546,800	340,219,500	295,719,870	145,490,900	0.97	0.98	0.94	0.96	0.95		277,183,040.00	265,983,584.00
5	Evaluasi RKPD Tahun 2014		76,054,000	-	-	-	-		76,054,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-		15,210,800.00	15,210,800.00
6	Evaluasi RPJMD Prov Sulteng Tahun 2011-2016		315,850,000	-	-	-	-		314,525,950	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-		63,170,000.00	62,905,190.00
7	Pengendalian Program Pembangunan Daerah Sumber Dana APBD		284,406,600	-	-	-	-		260,053,800	-	-	-	-	0.91	-	-	-	-		56,881,320.00	52,010,760.00
8	Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana APBD		771,897,200	-	-	-	-		751,557,300	-	-	-	-	0.97	-	-	-	-		154,379,440.00	150,311,460.00
9	Koordinasi Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan		127,742,200	-	-	-	-		101,224,000	-	-	-	-	0.79	-	-	-	-		25,548,440.00	20,244,800.00
10	Monitoring dan Evaluasi RAD-Pangan Gizi		150,000,000	-	-	-	-		148,100,900	-	-	-	-	0.99	-	-	-	-		30,000,000.00	29,620,180.00
11	Pengendalian Program Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN		242,088,800	-	-	-	-		214,651,700	-	-	-	-	0.89	-	-	-	-		48,417,760.00	42,930,340.00
12	Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN		221,433,200	-	-	-	-		219,977,450	-	-	-	-	0.99	-	-	-	-		44,286,640.00	43,995,490.00
13	Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)		154,591,800	-	-	-	-		145,168,100	-	-	-	-	0.94	-	-	-	-		30,918,360.00	29,033,620.00



Rencana Strategis Tahun 2021-2026
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Program Penguatan Kelembagaan AMPL-BM Provinsi Sulawesi Tengah		168,311,020	-	-	-	-	165,135,220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,662,204.00	33,027,044.00	
1	Koordinasi Penyusunan Program AMPL-BM Provinsi Sulawesi Tengah	168,311,020	-	-	-	-	165,135,220	-	-	-	-	0.98	-	-	-	-	33,662,204.00	33,027,044.00	
Program Kerjasama Pembangunan		158,270,000	-	-	-	-	153,980,760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,654,000.00	30,796,152.00	
1	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	158,270,000	-	-	-	-	153,980,760	-	-	-	-	0.97	-	-	-	-	31,654,000.00	30,796,152.00	
UPT Satisfad																			
Program Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan Daerah		0.8182	2,897,428,000	2,149,863,000	1,458,021,464	-	-	0.818	2,860,886,960	2,067,125,475	656,767,480	-	-	-	-	-	1,301,062,492.80	1,116,955,983.00	
1	Pengumpulan dan Analisa Data Pembangunan Daerah		-	526,658,000	49,875,000	-	-		-	489,427,900	39,010,000	-	-	0.93	0.78	-	115,306,600.00	105,687,580.00	
2	Penyusunan Profil dan Updating Capaian Pembangunan (SIPD)		320,683,400	450,000,000	141,193,480	-	-		318,831,160	439,642,500	139,170,980	-	-	0.99	0.98	0.99	182,375,376.00	179,528,928.00	
3	Penyusunan Informasi Geospasial Data Potensi SDA Provinsi Sulawesi Tengah		391,000,000	325,000,000	758,142,584	-	-		371,768,800	316,051,585	-	-	-	0.95	0.97	-	294,828,516.80	137,564,077.00	
4	Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah		572,875,400	555,000,000	304,604,400	-	-		572,124,500	553,683,740	294,215,800	-	-	1.00	1.00	0.97	286,495,960.00	284,004,808.00	
5	Pengelolaan Jaringan Informasi dan Sistem Informasi Pembangunan		-	293,205,000	204,206,000	-	-		-	268,319,750	184,370,700	-	-	-	0.92	0.90	-	99,482,200.00	90,538,090.00
6	Pengumpulan dan Analisis Data Indikator Kesejahteraan Petani		200,569,200	-	-	-	-		200,066,600	-	-	-	-	1.00	-	-	40,113,840.00	40,013,320.00	
7	Penyusunan Profil dan Statistik Daerah		238,690,000	-	-	-	-		236,783,400	-	-	-	-	0.99	-	-	47,738,000.00	47,356,680.00	
8	Persebaran Informasi Pembangunan		336,710,000	-	-	-	-		333,292,000	-	-	-	-	0.99	-	-	67,342,000.00	66,658,400.00	
9	Pembangunan Jaringan Data Spasial Daerah (JDSD)		259,950,000	-	-	-	-		258,035,100	-	-	-	-	0.99	-	-	51,990,000.00	51,607,020.00	
10	Pengumpulan dan Analisis Data Pembangunan Ekonomi		340,000,000	-	-	-	-		335,718,200	-	-	-	-	0.99	-	-	68,000,000.00	67,143,640.00	
11	Pengumpulan dan Analisis Data Pembangunan Sosial Budaya		236,950,000	-	-	-	-		234,267,200	-	-	-	-	0.99	-	-	47,390,000.00	46,853,440.00	
			23,271,656,996	20,972,300,000	17,443,939,894	20,863,110,000	14,956,972,951		22,389,085,940	20,192,290,411	15,762,573,364	19,516,562,671	13,361,623,446	-	-	-	19,501,595,968	18,244,427,166	



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA

Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan kepada Pemerintah, diperlukan perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) harus memperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan untuk mencapai tujuan Pembangunan Daerah, yaitu masyarakat yang adil dan makmur melalui perencanaan pembangunan yang mampu memberikan arah yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan, baik pada tingkat Daerah maupun Nasional;
2. Adanya perubahan regulasi yang tidak menyesuaikan dengan proses perencanaan di daerah;
3. Kemampuan pembiayaan pemerintah pusat serta pendapatan asli daerah yang masih terbatas;
4. Kondisi infrastruktur yang perlu diakselerasi untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan;
5. Kualitas lingkungan hidup, mitigasi, dan adaptasi bencana dan perubahan iklim yang perlu ditingkatkan;
6. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, belum di implementasikan secara optimal.

Sementara peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi tengah yaitu

1. Dukungan Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan pembangunan daerah;
2. Kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri;
3. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja aparatur;



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi, yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bappeda memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Tantangan 5 (Lima) tahun ke depan, Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel, yang memerlukan dukungan dari berbagai unsur pembangunan. Peningkatan kualitas perencanaan tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan Bappeda yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sistem perencanaan tersebut meliputi :

1. Peningkatan kapasitas SDM baik melalui pendidikan formal maupun diklat fungsional dan diklat teknis;
2. Pemanfaatan hasil penelitian, pengendalian dan evaluasi yang mendukung penyusunan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
3. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah; dan
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, pengolahan data dan informasi berbasis web untuk pengolahan data perencanaan.



Pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda ke depan masih menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan, antara lain :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
1	Perubahan Regulasi Perangkat Daerah mengubah Struktur dan Fungsi Organisasi	Miskin Struktur, Kaya Fungsi (<i>Money follow function</i>)	1	Inefisiensi, belum optimalnya kapasitas dan kemampuan SDM
2	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Belum Optimal	Implementasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah melalui Pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal	1	Pelaksanaan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan belum optimal
			2	Perumusan dokumen perencanaan pembangunan pada setiap bidang urusan belum optimal
			3	Perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan belum didasarkan pada rincian kebutuhan
			4	Pemanfaatan Sistem Informai Perencanaan Pembangunan Daerah belum terintegrasi antar sektor
	Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal		1	Dokumen perencanaan dan penganggaran belum konsisten
			2	Ketersediaan data analisa capaian Kinerja Perangkat Daerah belum optimal
			3	Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan kurang memadai
			4	Sistem informasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah belum tersedia

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas guna mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan sasaran misi RPJMD, Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu mengatasi tantangan untuk mewujudkan perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan akuntabel, peningkatan kapasitas SDM perencanaan, pemantapan kelembagaan



perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

3.2 Telaahan Visi Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur, adalah sebagai berikut:

Visi : " Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju"

Gerak Cepat dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara cepat melebihi tindakan normal, termasuk cepat dalam bertindak untuk menyelesaikan berbagai masalah, serta cepat mengetahui jika terjadi suatu kesalahan untuk kemudian memberikan solusi yang tepat, sedangkan

Lebih Sejahtera dapat dimaknai sebagai gambaran kondisi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah yang terbebas dari ancaman dan tekanan fisik, terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik pangan, sandang, perumahan yang layak dan memperoleh akses pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas dan adilbagi seluruh masyarakat serta terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan penghasilan yang lebih memadai.

Lebih Maju Gambaran dari kondisi suatu masyarakat yang lebih dinamis dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, kearah yang lebih baik melalui berbagai inovasi yang terintegrasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. Lebih Maju dapat pula merupakan suatu kondisi kehidupan komunitas masyarakat yang jauh lebih baik secara ekonomi, sosial maupun budaya sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi

Misi :

1. Meningkatkan kualitas manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM



3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang merata dan Berkeadilan
6. Menjaga Harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan
7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawan maupun didalam Provinsi Sulteng dan diluar Provinsi Tetangga
8. Meningkatkan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan dan Kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistematis dan digital
9. Mendorong pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Memperhatikan Visi dan Misi diatas, maka terkait dengan tugas dan fungsi, Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah mendukung tugas-tugas dalam pencapaian Misi 2 Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud, yaitu:

“Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM”.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian PPN dan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Bappenas, Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan negara.



Telaahan terhadap Kementerian/Lembaga dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah dan Renstra Kementerian/Lembaga sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Adapun Telaahan Keterkaitan Sasaran Kementerian PPN/Bappenas 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional
2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional
3. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner
4. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Sasaran tersebut, diimplementasikan dalam arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang relevan dengan tujuan yang telah dirumuskan. Kebijakan/strategi Bappenas juga tidak bisa dipisahkan dengan sasaran dari Prioritas Pembangunan Nasional, dimana arah kebijakan dan strategi Bappenas pada dasarnya adalah untuk mendukung prioritas tersebut dalam lingkup perencanaan pembangunan tingkat nasional. Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 mencakup 5 (lima) arah kebijakan yang dikategorikan berdasar hubungan antara tugas dan fungsi dari Kementerian PPN/ Bappenas dengan kerangka kinerja yang ditetapkan sebelumnya. Kelima arah kebijakan tersebut diantaranya adalah:

- 1. Menyusun perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasis bukti (*evidence based planning*).**

Perencanaan inovatif adalah perencanaan yang lebih memperhatikan pada pengembangan sistem yang telah ada dan memungkinkan mengubahnya serta menghasilkan hal baru dalam skala besar agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Sementara, inklusif adalah untuk memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah telah mempertimbangkan kebutuhan dan memberikan akses partisipasi kepada publik. Perencanaan berbasis

bukti (*evidence based planning*) merupakan pendekatan proses perencanaan dengan memprioritaskan intervensi yang terbukti efektif berdasar data dan informasi yang valid serta hasil studi ilmiah, mengidentifikasi hambatan dan membuat strategi peningkatan pencapaian pembangunan nasional sesuai dengan kondisi wilayah serta memperkirakan biaya dan dampak. Perencanaan berbasis bukti diharapkan dapat memberi hasil maksimal dan berdampak nyata bagi masyarakat.

2. Memastikan terlaksananya rencana pembangunan nasional secara efektif dan efisien melalui pengendalian proses pembangunan

Salah satu permasalahan utama dalam proses pembangunan pada periode sebelumnya (2015-2019) adalah tidak berjalannya proses pengendalian pembangunan berdasarkan rencana yang telah disusun dan disepakati bersama. Oleh karena itu, pada tahun 2020-2024 dan seterusnya, Kementerian PPN/Bappenas akan memaksimalkan fungsi pengendaliannya untuk memastikan bahwa rencana yang sudah disusun dan disepakati, minimal terlaksana sesuai dengan rencana yang tersusun. Upaya pengendalian ini telah terwadahi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

3. Mendorong Kementerian PPN/Bappenas dalam percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.

Untuk memastikan agar pemerintah tidak tertinggal dalam dinamika pembangunan dengan situasi perubahan yang begitu cepat, maka Kementerian PPN/Bappenas diharapkan ke depannya mampu menjadi pendorong percepatan pembangunan nasional bersama-sama dengan K/L/D terkait dalam kapasitasnya sebagai *enabler* pembangunan. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan yang lebih inovatif. Tujuannya adalah untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan itu sendiri. Selain itu, guna mendukung proses perencanaan, percepatan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan



tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga berperan serta dalam meningkatkan kapasitas K/L/D yang terlibat secara langsung dalam pembangunan agar memiliki kemampuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan inovasi dan percepatan pembangunan.

4. Meningkatkan kualitas pengelolaan Prioritas Nasional bidang *Geopark* KSST, dan Penguatan Perencanaan dan Penganggaran.

Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan mandat untuk melaksanakan Prioritas Nasional dalam Agenda 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, khususnya Proyek Prioritas Pengembangan 16 Destinasi Pariwisata Geopark; dan dalam Agenda 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, khususnya pada: (1) Kegiatan Prioritas Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional mengenai Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), dan (2) Proyek Prioritas Penguatan Perencanaan dan Penganggaran.

5. Meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berkualitas dan kredibel.

Peningkatan kualitas kinerja dukungan manajemen yang dilakukan pada periode ini diprioritaskan untuk menjadikan Kementerian PPN/Bappenas sebagai acuan K/L/D dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan di Indonesia. Untuk dapat mewujudkan perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasis bukti (*evidence based planning*), maka perlu diperkuat kapasitas institusi perencana baik di pusat maupun daerah melalui program pendidikan dan pelatihan perencanaan, pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP), pertukaran informasi perencanaan dengan mengoptimalkan teknologi daring dan platform *online*.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 menyebutkan bahwa sasaran dalam mewujudkan pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat;



2. Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya;
3. Tersedianya data statistik yang akurat (*up to date, valid* dan kemudahan akses untuk publik) untuk mendukung perencanaan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Hasil Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penataan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033.

Dengan terjadinya bencana Gempa Bumi dan likuifaksi serta berjalannya aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis, perkembangan kebijakan nasional, sangat berpotensi menimbulkan terjadinya perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu saat ini Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sedang melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah RTRW Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode tahun 2021-2041.

Hasil telaahan RTRW terhadap pengembangan pelayanan perangkat daerah urusan penunjang pemerintahan perencanaan pembangunan memiliki tantangan terhadap pengembangan pelayanan perangkat daerah sebagai berikut :

1. Adanya pengalihan penanggung jawab urusan penyusunan RTRW Provinsi sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah kepada Perangkat daerah yang mengampu sub urusan penataan ruang;



2. Dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah belum sepenuhnya mengacu pada Dokumen Rencana Tata Ruang.

3.4.2 Hasil Telaahan Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Hasil telaahan pengembangan pelayanan perangkat daerah terhadap KLHS ditemukan bahwa belum semua indikator *Sustainable Development Goals (SDG's)* yang menjadi kewenangan Provinsi dapat diakomodir dalam penyusunan dokumen perencanaan karena keterbatasan sumber data yang tersedia.

3.5. Penentuan isu-isu Strategis

Berdasarkan permasalahan dan tantangan 5 (lima) tahun ke depan isu tugas dan fungsi Bappeda, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan menjadi tugas Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, yaitu:

1. Kompetensi SDM perencana yang proporsional sesuai kebutuhan ideal.
2. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal;
3. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan Pemerintah Pusat (RPJMN/RKP) maupun dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) Kabupaten/Kota;
4. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat Daerah) serta dokumen APBD;
5. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem perencanaan pembangunan (Aplikasi SIPD) yang



terintegrasi dengan sisten informasi Perencanaan Pembangunan lainnya (e-data, e-budgeting, e-monev dan e-reporting) agar dapat dicapai program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten dan transparan.



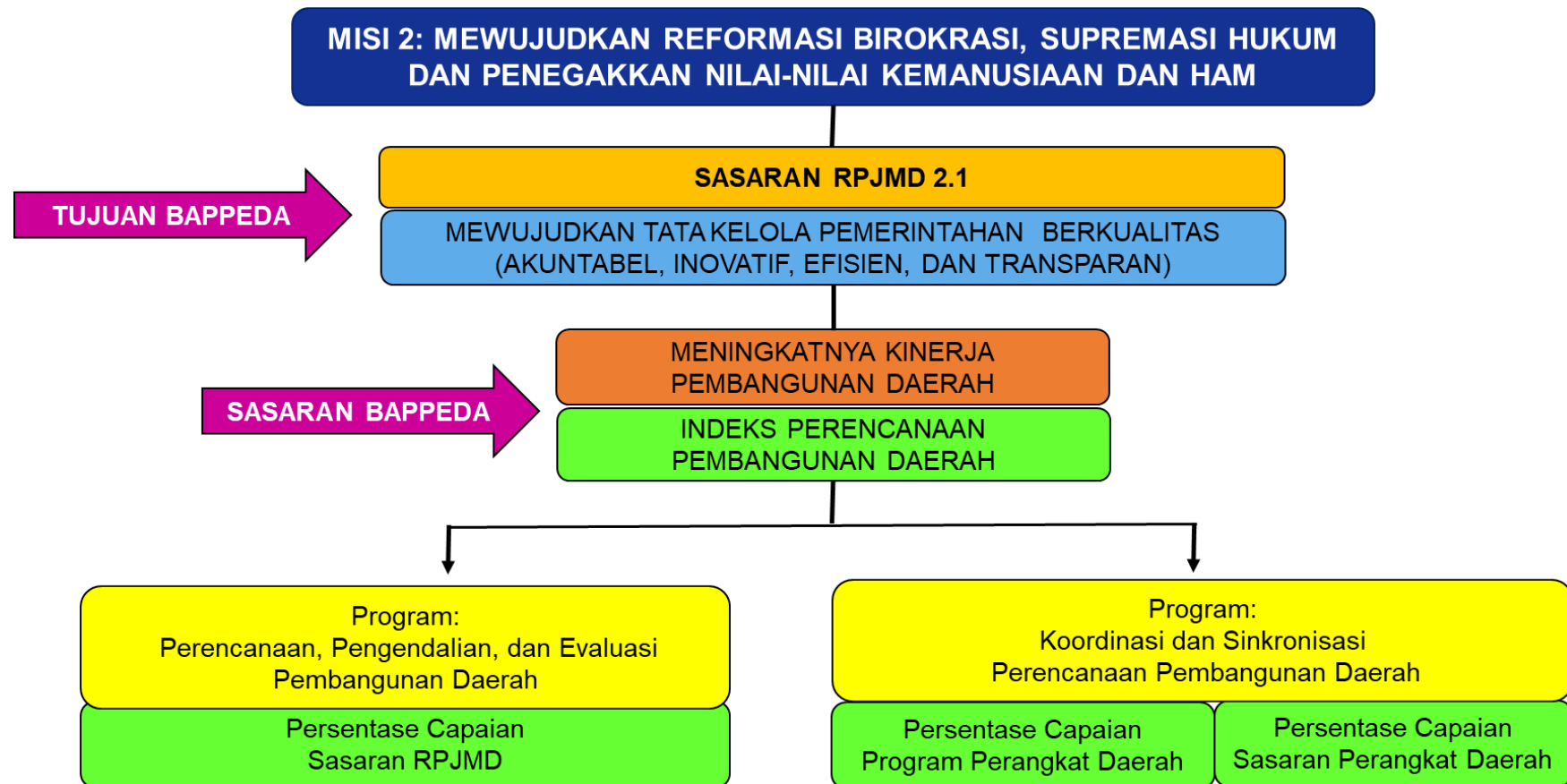
BAB IV

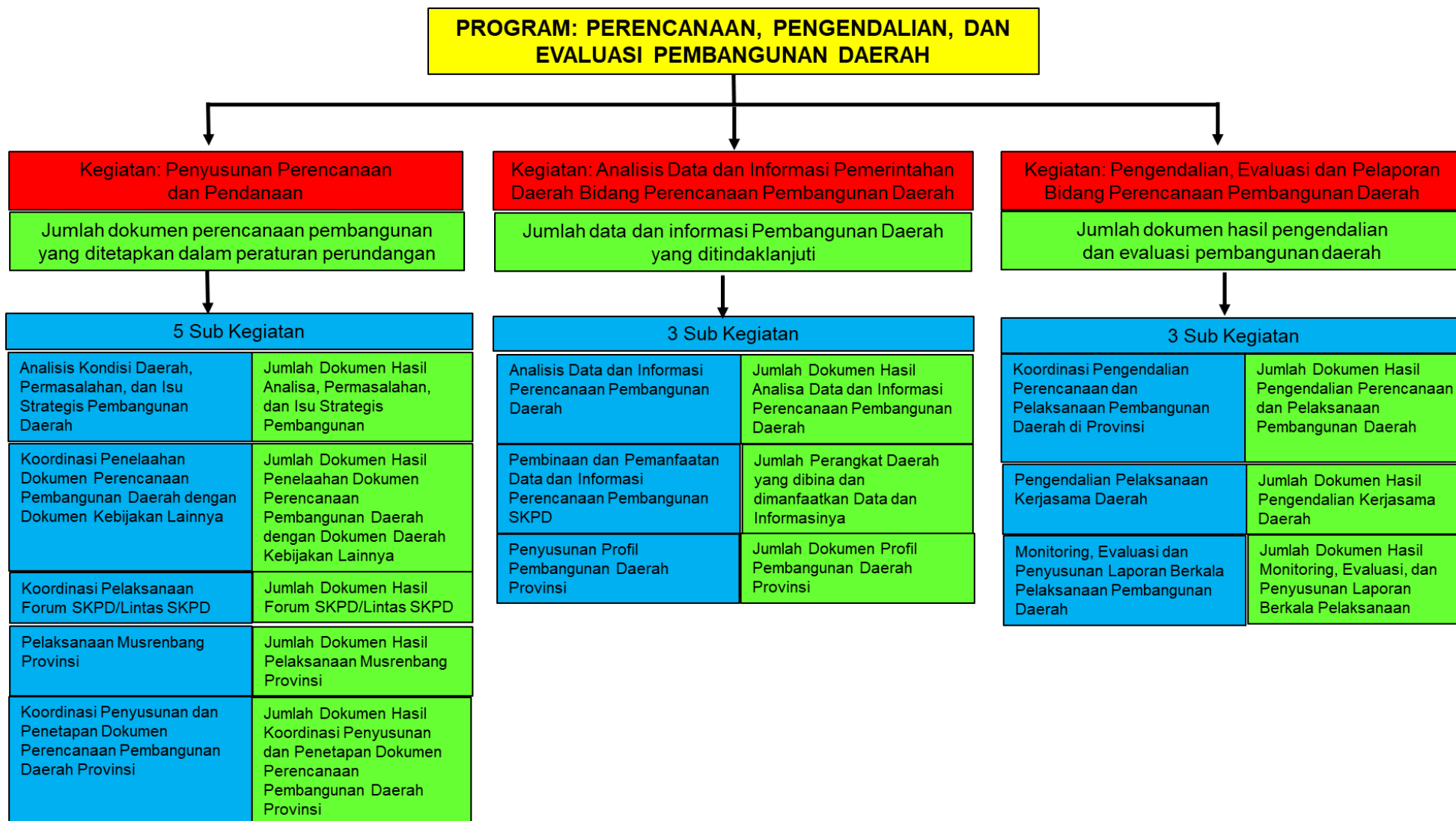
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilannya yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

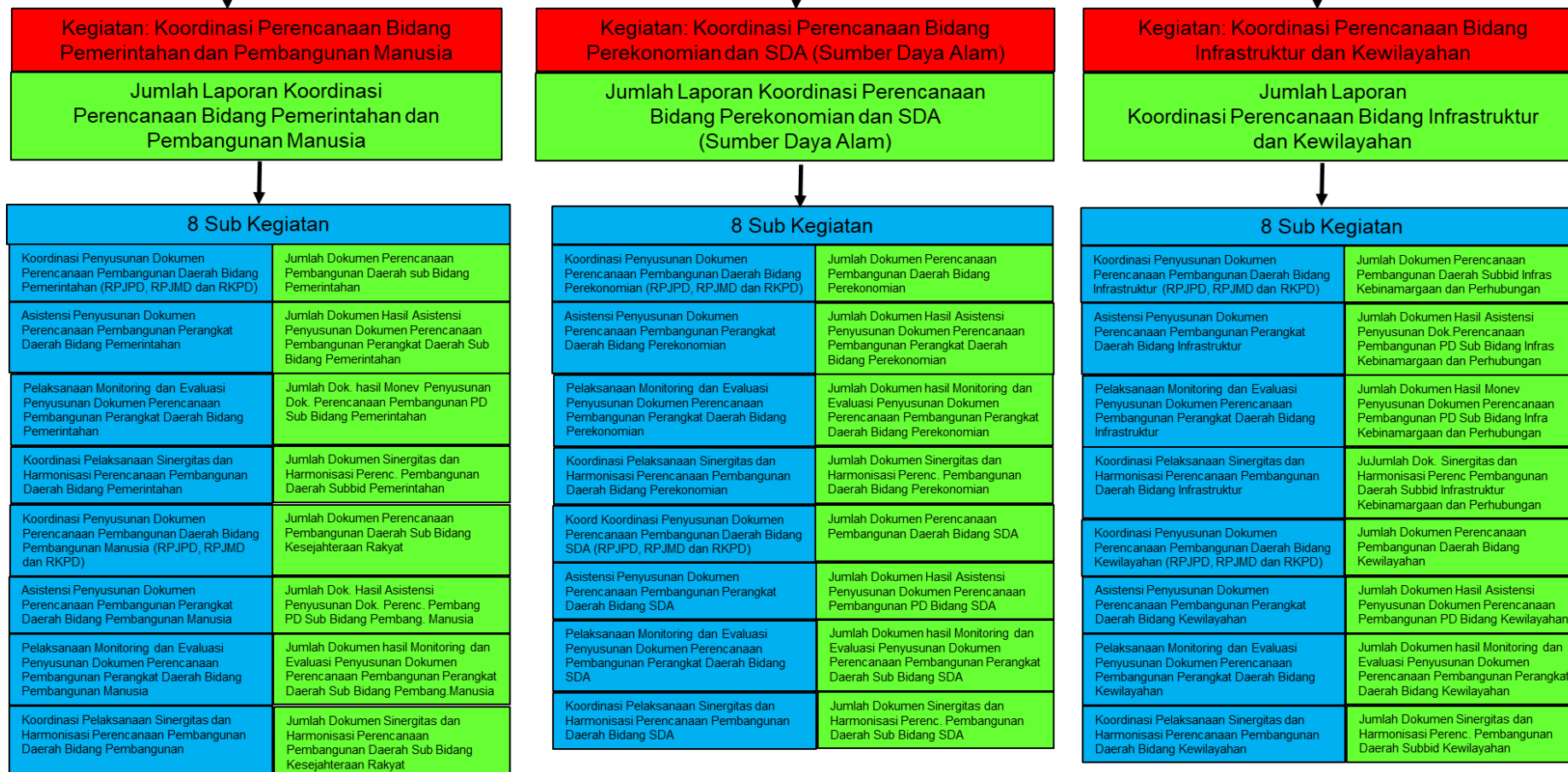
Rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Bappeda berdasarkan Misi Ke 2 yaitu : Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM, dan sesuai sasaran RPJMD Mewujudkan Tatakelola pemerintahan berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan) yang dijadikan sebagai Tujuan dalam Rencana Strategis lima tahun kedepan, yang dapat digambarkan pada *cascading* sebagai berikut :







PROGRAM: KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH





Berdasarkan analisis dan pendekatan sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2026 adalah dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya tata kelola pemerintahan berkualitas (akuntabel, inovatif, efisien dan transparan)		Nilai SAKIP	Angka	74	77	81	83	86
	Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks	73	74	75	76	77

Sumber : Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Rencana Strategis Tahun p2022-2026

Tujuan jangka menengah Bappeda secara umum adalah Meningkatkan Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah. Tujuan tersebut dicapai melalui sasaran kinerja perencanaan pembangunan daerah yang meningkat. Indikator sasaran yang digunakan adalah indeks perencanaan pembangunan. Dengan formula indikator sebagai berikut :
“60% Capaian sasaran RPJMD + 20% Sasaran perangkat daerah + 20% Capaian program perangkat daerah”



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah adalah strategi dan kebijakan Bappeda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda.

Berdasarkan visi dan misi Gubernur Sulawesi Tengah, maka strategi yang dicanangkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah untuk urusan perencanaan adalah (1) meningkatkan koordinasi penyusunan perencanaan dan evaluasi perangkat daerah dan (2) pelaksanaan otonomi daerah dan kerja sama antar daerah. Dari strategi tersebut, dapat dirumuskan beberapa arah kebijakan, yaitu (1) melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perangkat daerah (RKA/DPA) (2) melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan capaian kinerja OPD secara berkala (3) melaksanakan pengembangan otonomi daerah (4) melaksanakan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kerja sama antar daerah, dan (5) melaksanakan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Bappeda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan untuk Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, dapat dilihat dalam bagan berikut:



Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Startegi dan Kebijakan
Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022-2026

Visi : Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju					
Misi 2 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM					
Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Good Governance And Clean Government)	Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah	1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Perencanaan	1	Mengoptimalkan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Yang Fokus Pada Kompetensi Perencanaan
		2	Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan	2	Mengoptimalkan Sinkronisasi dan Sinergisitas Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Antar Tingkat Pemerintahan
				3	Melakukan Pembinaan Teknis Penyusunan dokumen Perencanaan dengan Penajaman Sesuai Bidang Urusan dan Kinerja Berjenjang Lintas Sektor
		3	Peningkatan Standar Mutu Perencanaan Melalui Digitalisasi	4	Penerapan Integrasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
				5	Menerapkan Sistem Informasi Berbasis Elektronik (E-Data)
		4	Pengembangan Metode Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	6	Menerapkan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi (e-Monev)
		5	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	7	Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran serta pelaporan kinerja berdasarkan sasaran strategis



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah diperlukan suatu instrumen berupa rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi

Rencana program, kegiatan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana susunan organisasi Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :



Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERIODE 2022-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENAGUNG-JAWAB	LOKASI
								2022		2023		2024		2025		2026			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Perencanaan			32,061,440,000		34,049,171,148		30,707,030,000		36,331,600,000		42,972,260,000		54,377,570,000			
Tervujudnya tata kelola pemerintahan berkualitas (akuntabel, inovatif, efisien dan transparan)				Nilai SAKIP	Indeks	71		74		77		81		83		86		Kepala Badan	
Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah				Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	72		73		74		75		76		77		Kepala Badan	
		5 0 0 1 2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Sasaran RPJMD	%	73	4,066,890,000	75	4,322,902,100	77	2,536,860,001	80	2,776,670,000	83	3,402,910,000	86	4,010,500,000	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
		5 1 2 2. 01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	Dokumen	5	2,213,173,700	5	2,473,822,100	6	1,496,955,001	6	1,550,382,360.20	6	1,684,621,400	6	1,684,621,159.63		
		5 0 0 1 2 01 1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	1	92,598,000	1	60,893,000	1	100,000,000	1	223,318,125	1	200,319,000	1	200,318,126		



Rencana Strategis Tahun 2022-2026
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

5 1	0 2	0 01	2. 01	0 2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	1	43,722,000	1	100,773,500	1	150,500,000	1	250,500,000	1	255,500,000	1	255,500,000		
5 1	0 2	0 01	2. 01	0 3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	-	1	318,854,300	1	208,383,270	1	250,300,000	1	231,000,000	1	231,000,000		
5 1	0 2	0 01	2. 01	0 4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	84,832,400	1	162,796,425	1	155,250,025	1	126,000,000	1	255,907,400	1	255,907,400		
5 1	0 2	0 01	2. 01	0 5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Baerita Acara Musrenbang Kabupaten / Kota	Berita Acara	1	914,467,825	1	537,077,375	1	238,250,000	1	250,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000		
5 1	0 2	0 01	2. 01	0 6	Penyiapan Bahan Koordinasi Nusrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan Yang terverifikasi Oleh Kecamatan	Usulan	0	-	0		0	-	0		0		0	-		
5 1	0 2	0 01	2. 01	0 7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang di tetapkan (RPJPD/RPJMD/R KPD)	Dokumen	3	1,077,553,475	2	1,293,427,500	3	644,571,706	2	450,264,235	3	441,895,000	4	441,895,634		
5 1	0 2	0 02	2. 02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah data dan informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	Laporan	4	845,234,200	2	849,080,000	2	341,655,000	3	475,550,000	3	658,000,000	3	658,000,000		
5 1	0 2	0 02	2. 02	0 1	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data Untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan)	Masukan	1	324,258,875	1	323,836,825	1	115,355,000	1	250,000,000	1	258,000,000	1	258,000,000		
5 1	0 2	0 02	2. 02	0 2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang Yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	1	185,783,600	1	412,432,050	1	126,300,000	1	150,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000		
5 1	0 2	0 02	2. 02	0 3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1	335,191,725		112,811,125		100,000,000	1	75,550,000	1	150,000,000	1	150,000,000		



Rencana Strategis Tahun 2022-2026
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

5	0	0	2.		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Dokumen	3	1,008,482,100	3	1,000,000,000	3	698,250,000	3	537,785,000	3	678,891,200	3	1,008,000,000		
5	0	0	2.	0	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	1	413,890,950	1	450,000,000	1	448,000,000	1	102,500,000	1	123,801,200	1	200,000,000		
5	0	0	2.	0	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan	Kerja sama	1	96,179,650	1	100,000,000	1	100,000,000	1	184,600,000	1	197,090,000	1	250,000,000		
5	0	0	2.	0	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	1	498,411,500	1	450,000,000	1	150,250,000	1	250,685,000	1	358,000,000	1	558,000,000		
5	0	0	2.		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Dokumen	0	-		-	3	300,000,000	3	212,952,640	3	381,397,400	3	659,878,840		
5	0	0	2.	0	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	0			-	1	100,000,000	1	71,002,640	1	120,002,400	1	250,000,000		
5	0	0	2.	0	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	0				1	100,000,000	1	54,000,000	1	135,600,000	1	210,000,000		
5	0	0	2.	0	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Provinsi	Dokumen	0				1	100,000,000	1	87,950,000	1	125,795,000	1	199,878,840		



Rencana Strategis Tahun 2022-2026
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

5 1	0 3	0		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Sasaran Perangkat Daerah	%	73	6,970,900,000	75	5,829,320,675	77	4,348,330,000	80	4,759,390,000	83	5,832,800,000	86	6,874,250,000	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
					Persentase Capaian Program Perangkat Daerah	%	73	-	75	-	77	-	80	-	83	-	86	-	
5 1	0 3	0 01	2.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai	%		2,202,295,975	-	2,146,499,925	-	1,553,718,939	-	1,618,367,027	-	1,943,723,025	-	2,288,155,840	-
5 1	0 3	0 01	2. 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah / Hasil Koordinasi sub Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD, dan RKPDP)	Dokumen	1	313,115,825	1	226,861,450	1	338,250,000	1	259,001,030	1	385,895,500	1	385,895,000	
5 1	0 3	0 01	2. 2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	10	90,066,650	1	120,234,025	1	125,060,000	1	135,000,000	1	175,812,071	1	257,233,140	
5 1	0 3	0 01	2. 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	10	302,698,700	1	196,624,525	1	198,050,000	1	250,480,997	1	257,465,800	1	259,465,800	
5 1	0 3	0 01	2. 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1	215,256,875	1	280,855,850	1	238,600,000	1	180,580,000	1	230,141,654	1	285,000,000	



Rencana Strategis Tahun 2022-2026
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

5 1	0 3	0 01	2. 5	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD,d an RKPD)	Dokumen	2	281,058,050	1	324,805,950	1	146,104,000	1	200,500,000	1	220,000,000	1	300,000,000		
5 1	0 3	0 01	2. 6	0	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja BidangPembangu nan Manusia	Perangkat Daerah	9	112,086,825	1	155,806,625	1	106,478,439		142,225,000	1	187,650,000	1	230,000,000		
5 1	0 3	0 01	2. 7	0	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	9	323,125,800	1	239,747,400	1	200,354,000	1	250,000,000	1	260,500,000	1	310,561,900		
	0 1	0 3	2. 8	0	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	564,887,250	1	601,564,100	1	200,822,500	1	200,580,000	1	226,258,000	1	260,000,000		
5 1	0 3	0 02	2.		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai	%	-	2,115,199,700	-	1,835,870,750	-	1,368,288,673	-	1,600,970,150	-	1,920,745,625	-	2,293,150,000		
5 1	0 3	0 02	2. 1	0	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	191,964,600	1	378,439,175	1	130,927,950	1	125,002,500	1	250,566,350	1	268,250,000		



Rencana Strategis Tahun 2022-2026
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

5 1	0 3	0 02	2. 02	0 2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	10	321,044,900	1	240,666,750	1	115,975,000	1	126,636,800	1	258,575,625	1	288,500,000
5 1	0 3	0 02	2. 03	0 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	10	220,540,750	1	225,558,750	1	200,052,000	1	200,560,000	1	258,957,600	1	300,000,000
5 1	0 3	0 02	2. 04	0 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Perekonomian	Laporan	1	346,718,900	1	350,053,350	1	207,747,675	1	256,950,675	1	200,586,050	1	275,250,000
5 1	0 3	0 02	2. 05	0 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Dokumen	1	402,355,025	1	295,704,175	1	212,000,000	1	275,100,175	1	250,560,000	1	255,000,000
5 1	0 3	0 02	2. 06	0 6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	5	121,135,025	1	97,852,350	1	156,214,048	1	150,000,000	1	200,780,000	1	250,500,000
5 1	0 3	0 02	2. 07	0 7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	5	316,549,075	1	247,596,200	1	204,052,000	1	325,400,000	1	300,400,000	1	375,400,000
5 1	0 3	0 02	2. 08	0 8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan dengan RKPD/RPJMD padang Bidang SDA	Laporan	1	194,891,425	1	-	1	141,320,000	1	141,320,000	1	200,320,000	1	280,250,000



Rencana Strategis Tahun 2022-2026
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

5 1	0 3	0 03	2. 03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infra Struktur dan Kewilayahan yang tercapai	Laporan	5	2,653,404,325	9	1,846,950,000	9	1,426,322,388	9	1,540,052,823	9	1,968,331,350	9	2,292,944,160		
5 1	0 3	0 03	2. 03	0 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPd)	Dokumen	1	178,630,000	1	305,853,000	1	124,168,000	1	154,168,000	1	154,168,000	1	280,000,000		
5 1	0 3	0 03	2. 03	0 2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	5	84,116,400	1	79,987,000	1	91,304,000	1	150,000,000	1	185,200,000	1	250,000,000		
5 1	0 3	0 03	2. 03	0 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	5	396,520,000	1	247,520,000	1	231,130,000	1	251,130,000	1	285,950,000	1	300,000,000		
5 1	0 3	0 03	2. 03	0 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD Pada Bidang Infrastruktur	Laporan	2	928,563,925	1	340,000,000	1	337,456,138	1	253,745,613	1	250,000,000	1	230,000,000		
5 1	0 3	0 03	2. 03	0 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD,dan RKPd)	Dokumen	1	276,258,000	1	314,140,000	1	175,250,000	1	216,946,000	1	216,946,000	1	280,000,000		



Rencana Strategis Tahun 2022-2026
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

		5 1	0 3	0 03	2. 03	0 6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	4	115,876,000	1	161,720,000	1	101,164,000	1	155,164,000	1	328,164,000	1	328,164,000		
		5 1	0 3	0 03	2. 03	0 7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	4	303,440,000	1	140,930,000	1	150,500,250	1	158,890,000	1	262,258,500	1	276,258,500		
		5 1	0 3	0 03	2. 03	0 8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan dengan RKPD/RPJMD padang Bidang Kewilayahan	Laporan	1	370,000,000	1	256,800,000	1	215,350,000	1	200,009,210	1	285,644,850	1	348,521,660		
Meningkatnya kualitas pengelolaan Administrasi, Pelayanan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah								Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	63.05		64,50		66,50		68,50		70,00		71,00			
Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Penganggaran SKPD								Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	63.05		64,50		66,50		68,50		70,00		71,00			
		5 1	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	63.05	21,023,650,000	64,50	23,896,948,373	66,50	23,821,840,000	68,50	28,795,540,000	70,00	33,736,550,000	71,00	43,492,820,000	Sekretaris Badan	
		5 1	0 1	0 1	1. 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	75	947,903,250	77	1,360,670,476	80	1,274,433,895	83	941,651,994	86	1,473,280,608	86	1,707,340,418	-	



Rencana Strategis Tahun 2022-2026
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

5	0	0	1.	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	319,590,000	3	564,038,200	3	313,054,000	3	250,558,250	3	213,054,000	3	413,054,000		
1	1	01	1																		
5	0	0	1.	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	4	173,475,000	4	161,940,000	4	100,000,000	4	170,009,744	4	170,000,000	4	178,411,418		
1	1	01	2																		
5	0	0	1.	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen	0	-			2	100,000,000	2	100,000,000	2	201,855,608	2	225,000,000		
1	1	02	3																		
5	0	0	1.	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen	0	-			2	100,000,000	2	112,500,000	2	250,500,000	2	260,000,000		
1	1	03	4																		
5	0	0	1.	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dokumen	0	-			2	100,000,000	2	100,046,000	2	200,000,000	2	200,000,000		
1	1	04	5																		
0	0	1.	0		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	454,838,250	2	634,692,276	2	386,504,895	2	50,538,000	2	254,996,000	2	248,000,000		
1	1	01	6	5																	



Rencana Strategis Tahun 2022-2026
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

5 1	0 1	0 1	1. 01	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	-	0	-	2	174,875,000	2	158,000,000	2	182,875,000	2	182,875,000
5 1	0 1	0 1	1. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	%	97	16,142,243,312	97	16,124,195,522	97	19,196,781,088	97	20,527,612,967	97	26,521,810,361	97	34,243,914,551
5 1	0 1	0 1	1. 02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/Bulan	12	15,301,153,637	12	15,585,224,747	12	18,056,648,951	12	19,258,922,580	12	25,550,325,224	12	33,000,648,951
5 1	0 1	0 1	1. 03	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	253,800,000	0	-	1	250,000,000	1	250,300,000	1	250,000,000	1	250,000,000
5 1	0 1	0 1	1. 02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	130,921,675	12	260,592,775	12	228,000,000	12	128,000,000	12	128,000,000	12	128,000,000
5 1	0 1	0 1	1. 02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	78,423,500	1	-	1	85,000,000	1	97,000,000	1	115,353,000	1	250,225,850
5 1	0 1	0 1	1. 02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	104,512,675	1	278,378,000	1	135,039,750	1	165,039,750	1	135,039,750	1	235,039,750
5 1	0 1	0 1	1. 02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	4	273,431,825	0	-	4	242,092,387	4	343,092,387	4	343,092,387	4	380,000,000



Rencana Strategis Tahun 2022-2026
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

5 1	0 1	0 1	1. 02	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran	Laporan	0	-	-	4	100,000,000	4	150,258,000	4	150,258,000	4	150,258,000			
5 1	0 1	0 1	1. 02	0 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	0	-	-	4	100,000,000	1	135,000,250	1	135,000,250	1	135,225,250			
5 1	0 1	0 1	1. 03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	3	108,242,525	3	-	3	248,240,014	3	642,775,750	3	726,082,650	3	753,332,650		
5 1	0 1	0 1	1. 03	0 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	-		1	50,000,000	1	56,250,000	1	100,000,000	1	56,250,000			
5 1	0 1	0 1	1. 03	0 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	-		0		1	57,250,250	1	80,000,000	1	158,000,000			
5 1	0 1	0 1	1. 03	0 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	0	-		0		1	148,500,000	1	185,500,000	1	148,500,000			
5 1	0 1	0 1	1. 03	0 4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Laporan	0	-		1	50,000,000	1	32,000,000	1	50,000,000	1	80,000,000			
5 1	0 1	0 1	1. 03	0 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Pada SKPD	Laporan	4	93,332,525	4	-	4	88,192,850	4	88,192,850	4	100,000,000	4	100,000,000		
5 1	0 1	0 1	1. 03	0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Laporan	12	14,910,000	12	-	12	60,047,164	12	110,582,650	12	110,582,650	12	110,582,650		



Rencana Strategis Tahun 2022-2026
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

5 1	0 1	0 1	1. 03	0 7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		-				1	150,000,000	1	100,000,000			
5 1	0 1	0 1	1. 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	76.61	-	80	-	85	772,210,000	90	1,808,754,959	92		92	2,010,856,000
5 1	0 1	0 1	1. 05	0 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	0	-				1	150,000,000	1	150,000,000	1	200,000,000	
5 1	0 1	0 1	1. 05	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	-				200	250,000,000	-	-	-	-	
5 1	0 1	0 1	1. 05	0 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		-				1	96,544,959	1	120,000,000	1	150,000,000	
5 1	0 1	0 1	1. 05	0 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian]	Dokumen	0	-	0	-	2	120,860,000	2	165,860,000	2	130,000,000	2	225,860,000
5 1	0 1	0 1	1. 05	0 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	-	0	-	4	127,500,000	4	247,500,000	4	297,500,000	4	297,500,000
5 1	0 1	0 1	1. 05	0 6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang dipulangkan	Orang	0	-					-	-	-	-	-	
5 1	0 1	0 1	1. 05	0 7	Pemulangan Pegawai yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	0	-					-	-	-	-	-	
5 1	0 1	0 1	1. 05	0 8	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Orang	0	-					-	-	-	-	-	
5 1	0 1	0 1	1. 05	0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	-			4	225,000,000	10	450,000,000	10	250,000,000	10	350,000,000
5 1	0 1	0 1	1. 05	1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Orang	0	-	0	-	6	190,250,000	6	190,250,000	6	200,000,000	6	228,896,000



Rencana Strategis Tahun 2022-2026
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

5	0	0	1.	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	-	0	-	30	108,600,000	30	258,600,000	30	300,000,000	30	558,600,000		
5	1	1	1.	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen		1,203,523,613		1,763,953,660		1,012,860,000		1,784,250,256		1,618,250,000		1,680,250,000		
5	0	0	1.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	26,130,425	1	57,657,060	1	30,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000	1	120,000,000		
5	0	0	1.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	0	-	0	-	1	100,000,000	1	250,000,000	1	100,000,000	1	150,000,000		
5	0	0	1.	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	800,841,188	1	1,108,584,600	1	194,960,000	1	354,000,000	1	354,000,000	1	354,000,000		
5	0	0	1.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	-				100,000,000	1	80,000,000	1	100,000,000	1	114,000,000		
5	0	0	1.	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan	Paket	1	32,810,000	1	176,355,000	1	124,650,000	1	68,000,256	1	80,000,000	1	80,000,000		
5	0	0	1.	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	0	-			1	50,000,000	30	54,000,000	30	106,000,000	30	54,000,000		
5	0	0	1.	0	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Paket	0	-				-		-		-				
5	0	0	1.	0	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	0	-			1	100,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	200,000,000		
5	0	0	1.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	343,742,000	1	421,357,000	1	158,250,000	1	258,250,000	1	258,250,000	1	258,250,000		
5	0	0	1.	1	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Dokumen	0	-			1	55,000,000	1	200,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000		



Rencana Strategis Tahun 2022-2026
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

5	0	0	1.	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	-	1	-	1	100,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000		
1	1	06	1																		
5	0	0	1.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen		574,656,250		377,689,863		408,411,418		1,000,000,000		700,000,000		400,000,000		
1	1	07																			
5	0	0	1.	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	0	-	0	-	5	200,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000		
1	1	07	1																		
5	0	0	1.	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	-	0	-	0		0	-	0		0			
1	1	07	2																		
5	0	0	1.	0	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar Yang disediakan	Unit	0	-	0	-	0		0	-	0		0			
1	1	07	3																		
5	0	0	1.	0	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah unit Alat Angkutan Darat tak Bermotor yang Disediakan	Unit	0	-	0	-	0		0	-	0		0			
1	1	07	4																		
5	0	0	1.	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	300	574,656,250	15	377,689,863	20	208,411,418	20	200,000,000	300	500,000,000	20	200,000,000		
1	1	07	5																		
5	0	0	1.	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	0	-	0		0	-	0		0			
1	1	07	6																		
5	0	0	1.	0	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	0	-				-						
1	1	07	7																		
5	0	0	1.	0	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	-	0	-	0		0	-	0		0			
1	1	07	8																		
5	0	0	1.	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	0	-	0		1	500,000,000	0		0			
1	1	07	9																		
5	0	0	1.	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	0	-	0		1	50,000,000	0		0			
1	1	07	0																		
5	0	0	1.	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	0	-	0		1	50,000,000	0		0			
1	1	07	1																		



Rencana Strategis Tahun 2022-2026
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

5	0	0	1.	1	1	08	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan ketatausahaan dan kepegawaian	Laporan		1,550,881,050		3,444,063,852		1,347,663,585		1,289,944,074		2,003,803,567		2,003,803,567			
5	0	0	1.	0	1	08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	-	0	1	120,000,000	1	100,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000				
5	0	0	1.	0	1	08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	473,220,000	12	420,310,000	12	353,220,000	12	373,220,000	12	573,220,000	12	573,220,000			
5	0	0	1.	0	1	08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa dan Peralatan dn Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	213,614,050	12	320,561,900	12	160,919,078	12	203,199,567	12	203,199,567	12	203,199,567			
5	0	0	1.	0	1	08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	864,047,000	12	2,703,191,952	12	713,524,507	12	613,524,507	12	1,077,384,000	12	1,077,384,000			
5	0	0	1.	0	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Laporan		496,200,000		826,375,000		333,450,000		800,550,000		693,322,814		693,322,814			
5	0	0	1.	0	1	09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, atau Kendaraan Dinas Jabatan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	103	474,300,000	105	575,000,000	105	300,550,000	105	400,550,000	105	300,550,000	105	300,550,000			
5	0	0	1.	0	1	09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Perizinannya	Unit	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0			
5	0	0	1.	0	1	09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0			
5	0	0	1.	0	1	09	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0			
5	0	0	1.	0	1	09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	Unit	0	-	0			-									
5	0	0	1.	0	1	09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	21,900,000	50	251,375,000	1	32,900,000	10	50,000,000	15	142,772,814	15	142,772,814			



Rencana Strategis Tahun 2022-2026
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

	5 0 0 1. 0 1 1 09 7	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit		-													
	5 0 0 1. 0 1 1 09 8	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	-													
	5 0 0 1. 0 1 1 09 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Saran dan Prasaran Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bagunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	-													
	5 0 0 1. 1 1 1 09 0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	0	-				1	350,000,000		1	250,000,000		1	250,000,000		
	5 0 0 1. 1 1 1 09 1	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Saran dan Prasaran Pendukung Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	0	-													
	5 0 0 1. 1 1 1 09 2	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Tanah	Jumlah Paket Pemeliharaan	Ha	0	-	0												



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan mengemukakan indikator kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD.

Memperhatikan Visi, Misi serta tujuan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, indikator kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah mendukung dalam pencapaian Misi 2 (dua) yaitu, Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.

Indikator kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah yang mendukung misi, tujuan dan sasaran RPJMD tersebut diatas, adalah sebagaimana tabel berikut

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	IKU RPJMD PROVINSI SULAWESI TENGAH :							
1	Indeks Reformasi Birokrasi	63.05	64.50	66.50	68.50	70.00	71.00	71.00
	INDIKATOR KINERJA DAERAH PROV. SULAWEI TENGAH							
2	Nilai Sakip	71	74	77	81	83	86	86
	INDIKATOR KINERJA SASARAN BAPPEDA PROV. SULAWEI TENGAH							
3	Indeks Perencanaan Pembangunan	72	73	74	75	76	77	77



Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama Bappeda

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Penjelasan	Metodologi
1	Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	(60% Capaian Sasaran RPJMD + 20% Capaian Sasaran OPD + 20% Capaian Program OPD)	<p>Sasaran RPJMD Adalah Sasaran yang tercantum di dalam tabel 5.4 Bab V RPJMD Prov. Sulawesi Tengah 2021-2026</p> <p>Capaian Sasaran OPD Adalah Indikator yang tercantum dalam tabel 4.1 Pada Renstra OPD</p> <p>Capaian Program OPD Adalah Indikator yang tercantum dalam tabel 6.1 Pada Renstra OPD</p>	Indeks Perencanaan Pembangunan di dapatkan dari penjumlahan indikator Sasaran RPJMD, Sasaran OPD dan Capaian Program OPD



BAB VIII PENUTUP

Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen dari pimpinan dan staf Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah.

Proses penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud telah melalui tahapan penyusunan serta proses verifikasi untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis telah selaras dengan rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2016.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini, akan dipergunakan sebagai :

1. Pedoman bagi seluruh unit kerja Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis;
2. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan dan bahan penyusunan rancangan RKPD;
3. Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

Apabila dikemudian hari Rencana Strategis ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari internal maupun eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.